



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA**

K E T E T A P A N

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA**

No. : I/MPRS/1960 *)

T E N T A N G

MANIFESTO POLITIK REPUBLIK INDONESIA

sebagai

GARIS-GARIS BESAR DARIPADA HALUAN NEGARA



*Dicabut dengan
TAP. MPR No. V/MPR/1973*

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA**

K E T E T A P A N

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA**

No. I/MPRS/1960 *)

TENTANG

MANIFESTO POLITIK REPUBLIK INDONESIA

sebagai

GARIS-GARIS BESAR DARIPADA HALUAN NEGARA

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA.**

Dalam rapat pleno ke-4 Sidang Pertama pada tanggal 19 Nopember 1960 di Bandung.

Setelah membahas :

- 1. Amanat Negara yang diucapkan oleh Presiden pada Pembukaan Sidang Pertama Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara pada hari Pahlawan 10 Nopember 1960;**
- 2. Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul „Penemuan kembali Revolusi kita” dan yang terkenal sebagai Manifesto Politik Republik Indonesia;**
- 3. Keputusan Dewan Pertimbangan Agung „Perincian Manifesto Politik Republik Indonesia 17 Agustus 1959” tertanggal 25 September 1959 No. 3/Kpts/Sd/II/59, yang telah disetujui oleh Presiden dalam „Kata Pengantar” Manifesto Politik Republik Indonesia pada hari Pahlawan 10 Nopember 1959;**

4. Amanat Presiden pada Sidang Pleno pertama Depernas mengenai Pembangunan Semesta Berencana pada tanggal 28 Agustus 1959 yang diucapkan dan yang tertulis, yang menjadi bahagian daripada haluan Negara;
5. Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1960 yang terkenal dengan nama „Jalannya Revolusi Kita” yang menjadi pedoman pertama daripada pelaksana Manifesto Politik Republik Indonesia;
6. Pidato Presiden tanggal 30 September 1960 yang diucapkan dimuka Sidang Umum P.B.B. yang berjudul "To build the world a new" (Membangun dunia kembali);

Menimbang :

bahwa perlu segera ditetapkan garis-garis besar daripada haluan negara dengan bagian-bagiannya serta pedoman-pedoman pelaksanaannya;

Mengingat :

1. Amanat penderitaan rakyat yang tergambar dalam pembukaan UUD 1945;
2. Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia tanggal 5 Juli 1959;
3. U.U.D. 1945;
 - a. pasal 1 ayat 2 yang menentukan bahwa „Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat” ;
 - b. Pasal 3 ;jo pasal IV aturan Peralihan;
 - c. Pasal 2 ayat 3;
4. Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959;
5. Penetapan Presiden No. 1 tahun 1960;
6. Bahwa rakyat Indonesia diseluruh kepulauan nusantara Indonesia telah menerima dan mempertahankan Manifesto Politik R.I. serta perinciannya;

Mendengar :

Permusyawaratan dalam rapat-rapat MPRS pada tanggal 17 s/d 19 Nopember 1960;

Memutuskan :

Menetapkan Ketetapan tentang Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara sebagai berikut :

Pasal 1.

Memperkuat Manifesto Politik Republik Indonesia serta perinciannya sebagai Garis-Garis Besar daripada haluan negara.

Pasal 2.

Amanat Presiden pada Sidang Pleno Depernas mengenai Pembangunan Semesta Berencana pada tanggal 28 Agustus 1959 yang diucapkan dan yang tertulis adalah garis-garis besar daripada haluan pembangunan.

Pasal 3

Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1960 yang terkenal dengan nama „Jalannya Revolusi Kita“ dan Pidato Presiden tanggal 30 September 1960 dimuka Sidang Umum P.B.B. yang berjudul „To build the world a new“ (Membangun dunia kembali) adalah pedoman-pedoman pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia.

Pasal 4

Menugaskan dengan kekuasaan penuh kepada Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia untuk melaksanakan putusan-putusan ini.

Ditetapkan dikota Bandung pada
tanggal 19 Nopember 1960

*) Berdasarkan Ketetapan No. XXXIX/MPRS/1967 ditetapkan, bahwa Pimpinan dan Badan Pekerja MPRS ditugaskan untuk meninjau kembali, meneliti dan mengganti Ketetapan MPRS No. 1/MPRS 1960. Rancangan pengganti sudah selesai disusun oleh Badan Pekerja MPRS, tetapi dalam Sidang Umum V belum sempat dibicarakan.